

## **EVALUASI PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA: Studi Kasus Kabupaten Lahat**

**Khairullah**

*Pemda Lahat, Bengkulu*

**Malik Cahyadin**

*Mahasiswa Pascasarjana UGM*

*Asisten Peneliti PSEKP UGM dan IEI Jakarta*

### **Abstract**

*This research aims to evaluate the concept and spatial pattern of regional expansion in Lahat District. The method in this research is deductive method and rationalistic approach. It adopts several techniques/guidelines from the existing regulations in order to consider comprehensively the spatial pattern in Lahat District.*

*The research uses three major criteria, which are: physic/environment, economic and social in order to formulate spatial pattern of regional expansion. The analysis of spatial pattern based on the physical/environmental criteria produces two regions of expansion, i.e. region I (9 sub-districts), and region II (10 sub-districts); the analysis on spatial analysis based on the economic criteria produces 2 regions, i.e. region I (8 sub-districts) and region II (11 sub-districts); the analysis on spatial pattern based on the social criteria produces 3 regions, i.e., region I (6 sub-districts), region II (6 sub-districts), and region III (7 sub-districts); the analysis on the combination of three criteria (physical/environmental, economic, and social criteria) in the overlay produces 2 regions, i.e., region I (8 sub-districts) and region II (11 districts); the analysis on comparison based on the analysis of spatial pattern which regards the physical/environment, economic and social criteria indicates that the policy has more weaknesses than the research result.*

**Keywords:** *regional expansion, spatial pattern, policy analysis, Lahat Distric.*

### **PENDAHULUAN**

Sejak kebijakan otonomi daerah di Indonesia dicanangkan banyak daerah-daerah yang cenderung untuk melaksanakan pemekaran wilayah. Peluang secara normatif untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan suatu daerah baru dapat dilaksanakan sepanjang mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam rangka memberikan payung hukum terhadap kebijakan pemekaran wilayah, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai penjabaran atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2000 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang pengaturan Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pembentukan suatu daerah otonomi baru dimungkinkan jika memenuhi syarat-syarat kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya perlu mempertimbangkan beberapa

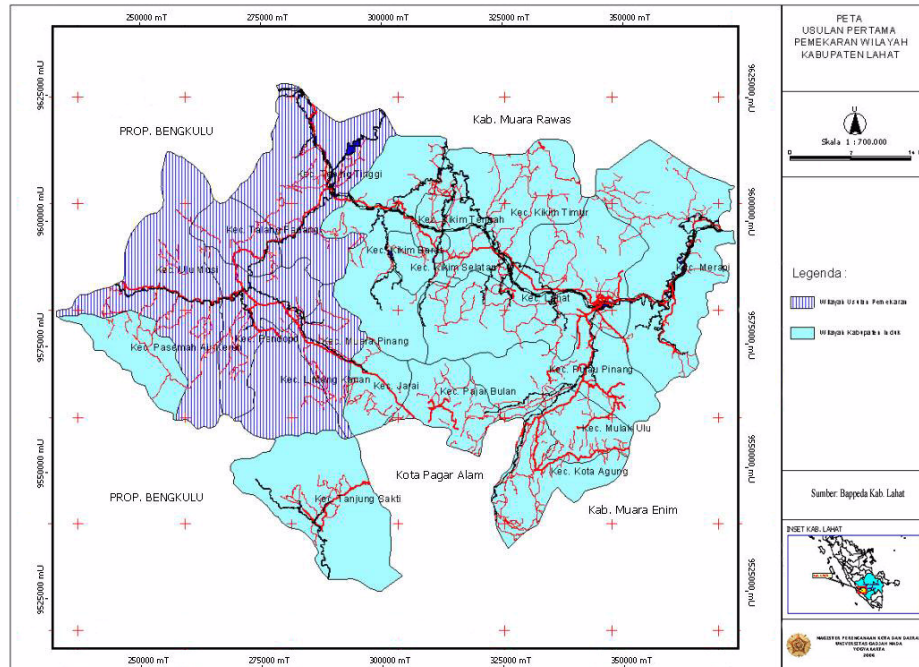
aspek seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pertimbangan pemekaran wilayah tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi disparitas pada wilayah yang dimekarkan maupun wilayah hasil pemekaran. Adapun manfaat dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing-masing kecamatan pada wilayah administrasi suatu Kabupaten/Kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik/lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran. Wilayah induk maupun wilayah-wilayah hasil pemekaran diharapkan mampu berperan sebagai pusat penggerak pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya, guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan

yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.

4. Pertimbangan kriteria sosial diperlukan untuk mengetahui rentang kendali antar kecamatan, interaksi, dan aktivitas masyarakat. Bertujuan agar kecamatan yang jauh dari jangkauan fasilitas pelayanan dan pusat pemerintahan dapat diatasi dengan adanya wilayah administratif baru.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Lahat tentang pemekaran wilayah berawal dari aspirasi masyarakat yang difasilitasi oleh pengurus Forum Perjuangan Masyarakat Lintang Empat Lawang. Keanggotaan forum tersebut terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh adat, pemuka masyarakat, tokoh agama. Kemudian untuk melancarkan proses pemekaran dibentuk forum dengan nama Forum Pemekaran Masyarakat Lintang Empat Lawang (FPM L IV L), forum bersepakat mengajukan pembentukan kabupaten baru yaitu dengan nama Kabupaten Empat Lawang kepada Pemerintah Kabupaten Lahat, dan disambut baik oleh pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat baik yang tergabung dalam wilayah pemekaran maupun masyarakat Kabupaten Lahat. Untuk lebih jelas pembagian wilayah pemekaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1:** Peta Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat

Berdasarkan fenomena kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan pemekaran wilayah dan faktor-faktor yang mendasari pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat.
2. Menjelaskan pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.
3. Membandingkan kelebihan dan kekurangan antara kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat dengan pola spasial atas dasar kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.

## KERANGKA TEORI

### Pengertian Wilayah

Menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992, wilayah adalah ruang kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Glasson (1974) dalam Tarigan (2005) bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisinya atau berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Wilayah Subjektif, yakni wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang berdasarkan kriteria tertentu atau tujuan tertentu,
2. Wilayah Objektif, maksudnya wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah.

Blair (1991) dalam Nugroho, dkk, (2003) menyebutkan bahwa dalam menganalisis wilayah dikenal tiga tipe, yaitu:

1. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen-komponen

didalam dan diluar wilayahnya, wujud wilayah sering dinamakan wilayah *nodal* yang didasari susunan (sistem) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul-simpul perdagangan,

2. Wilayah homogen maksudnya adanya relatif kemiripan relatif dalam wilayah,
3. Wilayah administratif maksudnya wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah (*region*) menurut Sihotang (1997) *regionalisme*, adalah sebagai suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud lebih meng-efektifkan dan mengefisienkan pemerintah dan perencanaan lokal dan nasional.

#### **Konsep Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Poernomosidi (1979), bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam, berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara.

Dalam konteks pengembangan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sektor-sektor utama pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah. Parr (1999) menyebut-

kan ada beberapa konsep pengembangan wilayah, yaitu:

1. Membangkitkan kembali daerah terbelakang (*depressed area*), sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada.
2. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekan tingkat konsentrasi wilayah dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian dari wilayah non-metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar.
3. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
4. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan akibat kurang memuaskannya struktur ekonomi inter-regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

#### **Konsep Pemekaran Wilayah**

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadi disparitas yang mencolok pada masa datang. Selanjutnya dalam suatu

usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat ada merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam memperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru disebabkan jarak pergerakan berubah. (P4N, UGM, 1997).

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekat tujuan pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup (PP No. 129 Tahun 2000). Sedangkan menurut Kirk, W. dalam Bintarto, dkk (1979) mengemukakan bahwa secara garis besar struktur lingkungan geografi dan berbagai aspek geografi lingkungan, dibagi menjadi dua yakni lingkungan fisik dan lingkungan non-fisikal.

#### **Kriteria dan Syarat-Syarat Pemekaran Wilayah**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dan ayat (4) yaitu Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) Pembentukan

daerah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Maksud dari *syarat administratif* ada persetujuan dari DPRD masing-masing daerah serta rekomendasi Menteri dalam Negeri, *syarat teknis* maksudnya meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. *Syarat fisik* paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan propinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, pada BAB III menuangkan syarat-syarat pembentukan, dari pasal 3 sampai dengan pasal 12 dan BAB IV menuangkan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah pada pasal 13. Pengukuran kriteria-kriteria pemekaran wilayah tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) kemampuan ekonomi, maksudnya cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu daerah propinsi atau kabupaten/kota, (b) potensi daerah, maksudnya tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat, (c) sosial budaya, maksudnya yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, serta kondisi sosial budaya masyarakat, (d) sosial politik, maksudnya kondisi sosial politik masyarakat, (e) jumlah penduduk, maksudnya jumlah tertentu penduduk suatu daerah, (f) luas daerah, maksudnya luas tertentu suatu daerah, (g) pertimbangan lain, maksudnya pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah (Tabel 1).

**Tabel 1:** Syarat (Kriteria) Pembentukan/Pemekaran Wilayah

No	Syarat/Kriteria	Indikator
1	Kemampuan ekonomi	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2. Penerimaan Daerah sendiri
2.	Potensi daerah	3. Lembaga Keuangan 4. Sarana dan prasarana ekonomi 5. Sarana pendidikan 6. Sarana sekolah 7. Sarana transportasi dan komunikasi 8. Sarana pariwisata 9. Ketenagakerjaan terhadap penduduk
3.	Sosial budaya	10. Tempat/ kegiatan institusi sosial 11. Tempat/ kegiatan institusi sosial 12. Sarana olahraga
4.	Sosial politik	13. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik 14. Organisasi kemasyarakatan
5.	Jumlah penduduk	15. Jumlah penduduk
6.	Luas daerah	16. Luas daerah
7.	Lain-lain	17. Keamanan dan ketertiban 18. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan 19. Rentang kendali

Sumber: PP 129 Tahun 2000

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan pendekatan rasionalistik. Berbagai teknik/pedoman dari peraturan-peraturan yang ada digunakan dengan mempertimbangkan pola spasial Kabupaten Lahat secara komprehensif untuk merumuskan berbagai alternatif pemekaran wilayah; alternatif-alternatif tersebut kemudian dibandingkan dengan dokumen kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat untuk mengetahui aspek kelebihan/kekurangannya.

### Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian seperti:

- a. Wawancara langsung dengan pihak pemerintah yang ada kaitannya dengan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat.
  - b. Hasil observasi lapangan, berupa hasil pengamatan dari lapangan yang berhubungan dengan topik penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literatur yang dipublikasikan diantaranya:
    - a. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses serta kriteria/syarat-syarat pemekaran wilayah.
    - b. Data instansional terdiri dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat, Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, Bappeda Kabupaten Lahat, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat.

### Alat Analisis

#### ***Analisis pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan***

Menganalisis data fisik dasar dan potensi fisik wilayah akan menggunakan analisis keseimbangan luasan sumberdaya alam, yaitu arahan fungsi pemanfaatan lahan dan kemampuan lahan dengan cara melakukan pengharkatan (penjumlahan) masing-masing variabel bertujuan untuk menilai potensi lahan masing-masing kecamatan.

#### ***Analisis pola spasial berdasarkan kriteria ekonomi***

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui potensial atau tidak potensial wilayah masing-masing kecamatan dengan membandingkan setiap unit pengamatan terhadap pembanding wilayah atau sektor yang lebih luas. Analisis digunakan untuk menilai potensi ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat, dengan menggunakan perhitungan *Location Quotient* (LQ).

$$LQ = \frac{v_i / V_i}{v_t / V_t}$$

Keterangan:

$v_i$  = pendapatan dari sektor di suatu daerah

$v_t$  = pendapatan total daerah tersebut

$V_i$  = pendapatan dari sektor sejenis secara regional/nasional

$V_t$  = pendapatan regional/nasional

Perhitungan Indeks Williamson (IW) digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi regional antar daerah. Perhitungan IW ini menggunakan PDRB Per Kapita Kabupaten Lahat menurut kecamatan atas dasar harga konstan tahun 1993 pada kurun waktu 2001 – 2004. Didasarkan atas harga konstan, maksudnya adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dinilai atas harga tahun dasar sehingga menunjukkan nilai riil karena telah menghilangkan faktor inflasi. Rumus

untuk menghitung Indeks Williamson dalam Muta'ali (2000), adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \times (n_i/N)}}{Y}$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = pendapatan per kapita kecamatan

$Y$  = pendapatan per kapita kabupaten

$n_i$  = penduduk kecamatan

$N$  = jumlah penduduk kabupaten

#### ***Analisis pola spasial berdasarkan kriteria sosial***

Rentang kendali dan waktu antar wilayah masing-masing pusat ibu kota kecamatan dikaji dan dianalisis dengan menggunakan analisis:

untuk *konversi* jarak ke waktu, yaitu *Jpr: Mt* (*km/menit*).

*Jpr* adalah daya jangkauan pelayanan riil dan *Mt* adalah limit waktu maksimum, Analisis ini diharapkan dapat menghasilkan sesuai dari tujuan pemekaran wilayah dan sebagai tolok ukur mempunyai keterkaitan dengan jumlah penduduk, jangkauan pelayanan, dan aktivitas masyarakat masing-masing kecamatan.

#### ***Analisis tumpang susun peta (overlay)***

Analisa peta merupakan alat analisis utama dalam penelitian ini, karena digunakan untuk mengetahui pola spasial Kabupaten Lahat sebagai variabel penelitian dan mengetahui hubungan antar variabel. Analisa peta dengan cara melakukan tumpang susun (*overlay*), interpretasi peta, dan juga menggunakan gambar/tabel/matriks untuk menganalisis interaksi wilayah.

## PEMBAHASAN

### **Kriteria Fisik/lingkungan**

Peta arahan fungsi pemanfaatan lahan dan peta kemampuan lahan di-*overlay*, maka menghasilkan peta prioritas pemekaran

wilayah Kabupaten Lahat selanjutnya peta tersebut di-*overlay*-kan lagi dengan peta administrasi Kabupaten Lahat. Untuk penentuan kelas prioritas pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat dibagi menjadi tiga kelas, terdiri dari kelas tinggi, sedang, dan rendah. Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2. Berdasarkan luas wilayah per kecamatan dari 19 (sembilan belas) ke-

camatan di Kabupaten Lahat secara keseluruhan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan hasil analisis pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan pemekaran wilayah pemekaran di Kabupaten Lahat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan antarklaster wilayah kecamatan menghasilkan dua wilayah pemekaran sebagaimana terlihat pada tabel 4 dan tabel 5.

**Tabel 2:** Hubungan Antar Variabel Penentu Arah Pemekaran Suatu Wilayah

Kemampuan Lahan Arahan Fungsi pemanfaatan Lahan	Kemampuan Lahan			
	Baik Sekali	Baik	Agak Baik	Sedang
Hutan Lindung	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Kawasan Penyangga	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kawasan Tanaman Tahunan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kawasan Tanaman Musiman / Permukiman	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Pengelolaan

**Tabel 3:** Pembagian Luas Wilayah Kabupaten Lahat Berdasarkan Kriteria Fisik/Lingkungan

No.	Kecamatan	LUAS (Ha)	LUAS MENURUT KELAS PRIORITAS (Ha)		
			RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Tanjung Sakti	500.59	285.39		215.20
2	Kota Agung	197.57	107.73		89.84
3	Mulak Ulu	222.58	15.34		207.24
4	Pulau Pinang	357.18	151.03		206.15
5	Jarai	205.02	14.16		190.86
6	Pajar Bulan	201.34	87.94		113.40
7	Muara Pinang	193.72	47.21	48.28	98.23
8	Lintang Kanan	264.55	178.52		86.03
9	Pendopo	288.06	62.27	31.32	194.47
10	Ulu Musi	560.38	190.59		369.79
11	Pasemah Air.K	217.9	153.80		64.10
12	Tebing Tinggi	590.93	24.74	95.52	470.67
13	Talang Padang	140.9	54.13	1.32	85.64
14	Kikim Barat	312.3	75.25	6.97	230.08
15	Kikim Timur	497.75		69.47	428.28
16	Kikim Selatan	118	9.50		108.50
17	Kikim Tengah	299.8			299.80
18	Lahat	757.37	263.23	6.37	487.77
19	Merapi	693.33	131.44	105.17	456.72

Sumber: Hasil Analisis



**Tabel 4:** Pembagian Luas Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat Berdasarkan Kriteria Fisik/Lingkungan Untuk Wilayah I

No.	Kecamatan	LUAS (Ha)	LUAS MENURUT KELAS PRIORITAS (Ha)			KETERANGAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMEKARAN
			RENDAH	SEDANG	TINGGI	
1	Kota Agung	197,57	107,73		89,84	I
2	Mulak Ulu	222,58	15,34		207,24	I
3	Pulau Pinang	357,18	151,03		206,15	I
4	Kikim Barat	312,3	75,25	6,97	230,08	I
5	Kikim Timur	497,75		69,47	428,28	I
6	Kikim Selatan	118	9,5		108,5	I
7	Kikim Tengah	299,8			299,8	I
8	Lahat	757,37	263,23	6,37	487,77	I
9	Merapi	693,33	131,44	105,17	456,72	I
Jumlah Luas		3455,88	753,52	187,98	2514,38	

Sumber: Hasil Analisis

**Tabel 5:** Pembagian Luas Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat Berdasarkan Kriteria Fisik/Lingkungan Untuk Wilayah II

No.	Kecamatan	LUAS (Ha)	LUAS MENURUT KELAS PRIORITAS (Ha)			KETERANGAN PEMBAGIAN WILAYAH PEMEKARAN
			RENDAH	SEDANG	TINGGI	
1	Tanjung Sakti	500,59	285,39		215,2	II
2	Jarai	205,02	14,16		190,86	II
3	Pajar Bulan	201,34	87,94		113,4	II
4	Muara Pinang	193,72	47,21	48,28	98,23	II
5	Lintang Kanan	264,55	178,52		86,03	II
6	Pendopo	288,06	62,27	31,32	194,47	II
7	Ulu Musi	560,38	190,59		369,79	II
8	Pasemah Air.K	217,9	153,8		64,1	II
9	Tebing Tinggi	590,93	24,74	95,52	470,67	II
10	Talang Padang	140,9	54,13	1,32	85,64	II
Jumlah Luas		3163,39	1098,75	176,44	1888,39	

Sumber: Hasil Analisis

#### Kriteria Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan (Tarigan, 2004; Sugiana, 2001). Dari PDRB tersebut dapat dianalisis potensi perekonomian suatu wilayah.

Sementara itu, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antarwilayah (daerah

dapat dianalisis dengan menggunakan metode Indeks Williamson (IW). Untuk menghitung indeks kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Lahat didasarkan atas PDRB per kapita, atas dasar harga konstan 1993, pada kurun waktu tahun 2001 – 2004. PDRB atas dasar harga konstan 1993 dijadikan variabel perhitungan karena menunjukkan nilai riil, telah menghilangkan faktor inflasi. Kriteria pengukuran kesenjangan ekonomi antar-daerah berdasarkan metode IW adalah antara nol dan satu. Jika nilai IW mendekati nol berarti terjadi pemerataan antar daerah (kecamatan) di Kabupaten Lahat. Hasilnya, jika nilai IW mendekati satu menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Lahat.

Berdasarkan hasil analisis wilayah Kabupaten Lahat kriteria ekonomi, maka pola spasial Kabupaten Lahat dapat dibagi menjadi dua wilayah pemekaran, yaitu wilayah I dengan 8 kecamatan dan wilayah II dengan 11 kecamatan. *Cluster* kecamatan yang masuk dalam wilayah I dan II dapat dilihat pada tabel 6.

### Kriteria Sosial

Pembagian pemekaran wilayah Kabupaten Lahat akan dianalisis berdasarkan kriteria sosial karena pemekaran wilayah merupakan salah satu penentu pembatas yang dipakai sebagai dasar pertimbangan berupa aktivitas pada masyarakat, diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan-kemudahan seperti pelayanan dan interaksi keruangan pada wilayah yang baru. Pemekaran wilayah dengan menggunakan kriteria ini akan mempertimbangkan dan memperhatikan keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul, terutama dalam kaitan kemungkinan tidak sinkronnya antara batas-batas tradisional dalam pengelolaan dan alokasi sumberdaya yang ada.

Berdasarkan hasil analisis wilayah Kabupaten Lahat kriteria sosial dengan menggunakan variabel rentang kendali dan waktu, maka pola spasial Kabupaten Lahat dapat dibagi menjadi tiga wilayah pemekaran kabupaten sebagaimana terlihat pada tabel 7.

**Tabel 6:** Hasil Pembagian Wilayah Pemekaran Kab.Lahat Berdasarkan Kriteria Ekonomi

Wilayah I	Wilayah II
Kecamatan	Kecamatan
1. Kikim Tengah	1. Tebing Tinggi
2. Kikim Selatan	2. Kikim Barat
3. Kikim Timur	3. Talang Padang
4. Pulau Pinang	4. Pasemah Air Keruh
5. Merapi	5. Ulu Musi
6. Mulak Ulu	6. Pendopo
7. Kota Agung	7. Muara Pinang
8. Lahat	8. lintang Kanan
	9. Jarai
	10. Pajar Bulan
	11. Tanjung Sakti

Sumber: Hasil Analisis

**Tabel 7:** Pembagian wilayah Pemekaran berdasarkan Kriteria Sosial

No	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III
	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
1	Lahat	Pendopo	Pasemah Air Keruh
2	Mulak Ulu	Pajar Bulan	Ulu Musi
3	Kota Agung	Jarai	Talang Padang
4	Pulau Pinang	Tanjung Sakti	Tebing Tinggi
5	Kikim Timur	Muara Pinang	Kikim Barat
6	Merapi	Lintang Kanan	Kikim Selatan
			Kikim Tengah

Sumber: Hasil Analisis dan Pengamatan Lapangan

### Pembagian Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat

Pemekaran kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas layanan pada masyarakat. Keseimbangan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten baru perlu dipertimbangkan, diupayakan agar pada masa datang pemekaran wilayah tidak muncul disparitas antarwilayah.

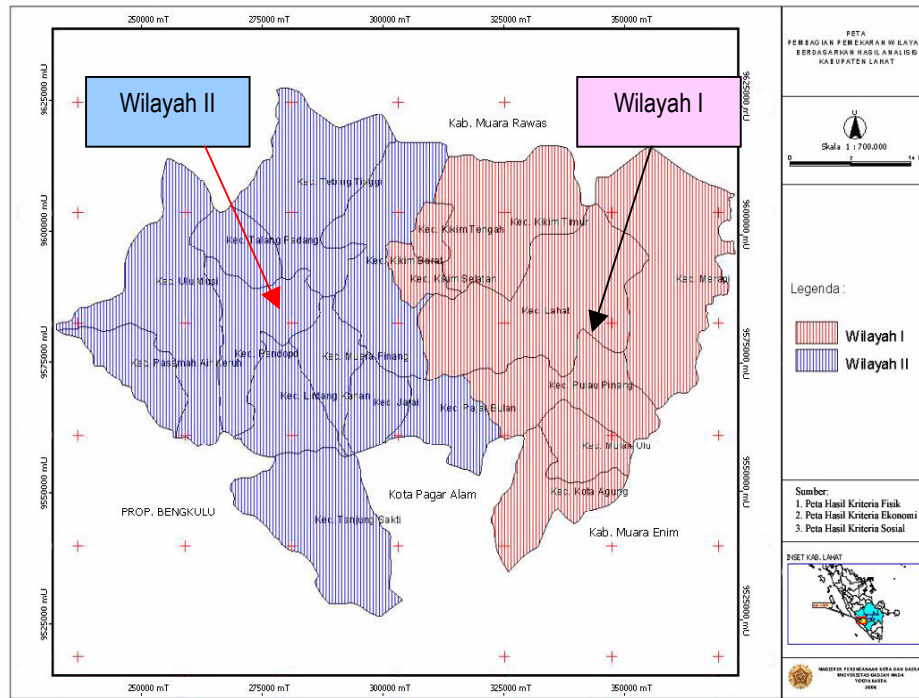
Pembagian wilayah pemekaran Kabupaten Lahat dikaji dan dianalisis agar tidak terjadi disparitas antar wilayah kabupaten induk dengan wilayah kabupaten baru, berdasarkan analisis fungsi wilayah untuk

mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Lahat. Berdasarkan kajian dan analisis kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial, hasil pembagian kluster kecamatan tidak sama, maka dari analisis masing-masing dilanjutkan dengan melakukan *overlay* ke tiga peta hasil analisis, bertujuan untuk menghasilkan wilayah pemekaran Kabupaten Lahat. Proses akhir dari pembagian wilayah pemekaran menghasilkan 2 (dua) wilayah pemekaran, yaitu Wilayah I dan Wilayah II, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

**Tabel 8:** Pembagian Wilayah Pemekaran Kabupaten Lahat Berdasarkan Hasil Penelitian

Wilayah Pemekaran I	Wilayah Pemekaran II
Kecamatan	Kecamatan
1. Kikim Tengah	1. Tebing Tinggi
2. Kikim Selatan	2. Kikim Barat
3. Kikim Timur	3. Talang Padang
4. Pulau Pinang	4. Pasemah Air Keruh
5. Merapi	5. Ulu Musi
6. Mulak Ulu	6. Pendopo
7. Kota Agung	7. Muara Pinang
8. Lahat	8. Lintang Kanan
	9. Jarai
	10. Pajar Bulan
	11. Tanjung Sakti

Sumber: Hasil Analisis



**Gambar 2:** Peta *Overlay* Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat Berdasarkan Hasil Penelitian

**Evaluasi Kebijakan Pemekaran**

Evaluasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat ditujukan untuk mengetahui sisi kelemahan dan kelebihan antara kebijakan pemekaran wilayah dan hasil penelitian. Hasil evaluasi kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan cluster kecamatan dan jumlah penduduk, pemekaran wilayah Kabupaten Lahat kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa Wilayah I (Kabupaten Induk) berjumlah 12 (dua belas) kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 336.432 jiwa dan Wilayah II (Kabupaten Baru) berjumlah 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 205.462 jiwa. Sehingga terjadi perbedaan yang cukup signifikan.

Sedangkan pemekaran wilayah Kabupaten Lahat hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah I berjumlah 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 249.865 jiwa dan Wilayah II berjumlah 11 (sebelas) kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 292.029 jiwa. Sehingga perbedaan di kedua wilayah relatif kecil (seimbang).

- b. Berdasarkan luas wilayah, kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa Wilayah I (Kabupaten Induk) mempunyai luas 4.362 Km<sup>2</sup> dan Wilayah II (kabupaten baru) dengan luas 2.256 Km<sup>2</sup>. Sehingga terjadi perbedaan luas wilayah yang cukup signifikan. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah I dengan luas 3,183

- Km<sup>2</sup> dan Wilayah II dengan luas 3,435 Km<sup>2</sup>. Sehingga perbedaan luas wilayah antara wilayah I dan II relatif kecil (seimbang).
- c. Berdasarkan kriteria ekonomi, kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa nilai kesenjangan (nilai Indeks Williamson) antar-kecamatan di wilayah I (Kabupaten Induk) dan II (kabupaten baru) relatif kecil. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan nilai kesenjangan (nilai Indeks Williamson) antar-kecamatan di wilayah I dan II relatif besar, meskipun di kedua wilayah tersebut nilai kesenjangan relatif kecil. Namun demikian, nilai kesenjangan di wilayah II hasil penelitian (0,2807) lebih baik daripada wilayah II kebijakan pemerintah (0,3129).
  - d. Rentang kendali dan waktu perjalanan antar ibu kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lahat, berdasarkan kebijakan pemerintah pada Wilayah I (kabupaten induk) menunjukkan bahwa dari 12 kecamatan ada tiga kecamatan (Kecamatan Tanjung Sakti, Jarai, dan Pajar Bulan) untuk menuju ke pusat pemerintahan (kabupaten induk) harus melalui wilayah administrasi Kota Pagar Alam dan terdapat kecamatan yang waktu tempuh perjalanannya termasuk

klasifikasi jauh. Sedangkan Wilayah II antar kecamatan masuk ke dalam cluster semua sama-sama berdampingan dan aksesibilitas transportasi darat dalam satu wilayah administrasi yang sama. Waktu tempuh perjalanan antar kecamatan dalam cluster II termasuk dalam klasifikasi dekat dan sedang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah I hubungan transportasi darat semuanya melewati dalam satu wilayah administrasi yang sama dan terkait lamanya perjalanan antar kecamatan termasuk klasifikasi dekat dan sedang. Wilayah II tidak ada kecamatan yang melakukan hubungan transportasi darat melewati wilayah administrasi kabupaten/kota lain, semuanya dalam satu wilayah yang sama. Terkait lamanya perjalanan antar kecamatan ada kelemahan, yaitu antar Kecamatan Tanjung Sakti dengan Kecamatan Kikim Barat, karena termasuk klasifikasi jauh, sedangkan yang lain masuk klasifikasi dekat dan sedang.

Hasil pembagian wilayah pemekaran Kabupaten Lahat berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lahat dan hasil penelitian tentang kesesuaian kelebihan dan kelemahan masing-masing, dapat dilihat pada tabel 9.

**Tabel 9:** Kesesuaian kelebihan dan kelemahan Pemekaran Wilayah Kabupaten Lahat

No.	Kriteria	Kebijakan Pemerintah		Hasil Penelitian	
		Kelebihan	Kelemahan	Kelebihan	Kelemahan
1	Cakupan Kriteria Pemekaran Wilayah		Pembagian wilayah tidak mengkaji dan menganalisis spasial Kabupaten Lahat secara menyeluruh, hanya berdasarkan pada SK No. 1 thn 1991	Pembagian wilayah dengan mengkaji dan menganalisis spasial Kabupaten Lahat secara menyeluruh	
2	Jumlah Penduduk		Perbedaan jumlah penduduk antara wilayah I dan II signifikan	Jumlah penduduk antara wilayah I dan II, relatif seimbang	
3	Luas Wilayah		Perbedaan luas antara wilayah I dan II signifikan	Luas antara wilayah I dan II relatif seimbang	
4	Rentang Kendali	Seluruh kecamatan di Wilayah II (Kabupaten Baru) berdampingan dan tidak melewati wilayah administrasi kabupaten/kota lain.	1. Wilayah I (Kabupaten Induk) dari 12 kec. terdapat 3 kec. untuk menuju ke pusat pemerintahan harus melewati kota lain (Pagar Alam) 2. Terdapat kecamatan dengan klasifikasi jangkauan (jarak) yang cukup jauh	Seluruh kecamatan di Wilayah I dan II berdampingan dan tidak melewati wilayah administrasi kabupaten/kota lain.	Kecamatan Tanjung Sakti. Dan Kikim Barat di wilayah II termasuk klasifikasi jangkauan (jarak) jauh
5	Ekonomi	Tingkat kesenjangan antarkecamatan. Di wilayah I dan II relatif kecil.	Pertimbangan potensi ekonomi di masing-masing kecamatan pada wilayah I dan II tidak dijelaskan.	1. Memperhitungkan potensi ekonomi antar kecamatan di wilayah I dan II 2. Tingkat kesenjangan antarkecamatan di wilayah II hasil penelitian lebih kecil dibanding wilayah II kebijakan pemerintah	Perbedaan tingkat kesenjangan wilayah I dan II hasil penelitian lebih besar dibandingkan usulan pemerintah
6	Sosial	Fasilitas publik di wilayah I dan II relatif seimbang		Fasilitas publik di wilayah I dan II relatif seimbang	

Sumber: Hasil Analisis

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya terhadap kriteria-kriteria pemekaran wilayah Kabupaten Lahat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis fungsi wilayah, di bagi dua, yaitu: analisis matriks fungsi tidak memasukkan ibu kota Kabupaten Lahat dan analisis matriks fungsi memasukkan seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat.
  - (a) hasil analisis pertama menunjukkan bahwa terdapat satu kecamatan pada posisi Orde I, yaitu: Kecamatan Tebing Tinggi. Kecamatan pada Orde II, yaitu: Kecamatan Tanjung Sakti. Pada posisi Orde III terdiri dari Kecamatan Kikim Timur dan Merapi. Pada posisi Orde IV adalah Kecamatan Kota Agung, Mulak Ulu, Pulau Pinang, Jarai, Muara Pinang, Pendopo, Ulu Musi, dan Kikim Barat. Pada posisi Orde V adalah Kecamatan Pajar Bulan, Lintang Kanan, Pasemah Air Keruh, Talang Padang, Kikim Selatan dan Kikim Tengah.
  - (b) sedangkan analisis kedua menunjukkan bahwa Kecamatan Lahat pada posisi Orde I, kecamatan pada kedudukan Orde II tidak ada. Kecamatan Tebing Tinggi pada Orde I bergeser menjadi Orde III, Kecamatan Tanjung Sakti pada Orde II bergeser menjadi pada Orde IV, Kecamatan Kikim Timur dan Merapi pada Orde III bergeser menjadi Orde IV, Kecamatan Kota Agung, Mulak Ulu, Pulau Pinang, Jarai, Muara Pinang, Ulu Musi, dan Kikim Barat pada Orde IV (tetap), kecuali Kecamatan Pendopo bergeser pada Orde V. Dan kecamatan pada Orde V tetap.

2. Hasil dari pola spasial berdasarkan kriteria fisik/lingkungan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel arahan fungsi pemanfaatan lahan dan kemampuan lahan serta sumber daya lahan menghasilkan dua wilayah pemekaran, yaitu Wilayah I (9 kecamatan) dan Wilayah II (10 kecamatan).
3. Hasil dari pola spasial berdasarkan kriteria ekonomi menghasilkan dua wilayah pemekaran yaitu Wilayah I (8 kecamatan) dan Wilayah II (11 kecamatan).
4. Hasil dari pola spasial menghasilkan 3 (tiga) wilayah pemekaran, yaitu Wilayah I (6 kecamatan), Wilayah II (6 kecamatan) dan Wilayah III (7 kecamatan).
5. Hasil akhir penggabungan (*overlay*) dari ke tiga pola spasial (kriteria fisik, ekonomi, dan sosial) pemekaran wilayah Kabupaten Lahat menghasilkan dua wilayah pemekaran yaitu Wilayah I (8 kecamatan) dan Wilayah II (11 kecamatan).
6. Hasil studi komparasi antara kebijakan pemerintah dan hasil penelitian adalah bahwa berdasarkan analisis pola spasial dengan memperhatikan kriteria fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa pembagian wilayah hasil kebijakan pemerintah Kabupaten Lahat mempunyai banyak kelemahan dibandingkan hasil penelitian.

### Rekomendasi

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti memberikan masukan sebagai berikut:

1. Bagi penerapan kebijakan di wilayah lain.
  - a. Kebijakan pemekaran wilayah perlu dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif dari berbagai

- aspek, sehingga hasilnya berguna dalam pengambilan keputusan serta diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dari pemekaran wilayah.
- b. Pembagian wilayah pemekaran perlu dihindari dampak yang bisa menimbulkan disparitas antar-wilayah hasil pemekaran wilayah.
  2. Rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Lahat.  
Untuk menghindari disparitas antar-wilayah yang dimekarkan dengan wilayah hasil pemekaran, maka perlu dikaji dan dianalisis secara komprehensif kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lahat secara menyeluruh. Karena pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah merupakan upaya peningkatan sumberdaya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antarwilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
  3. Masukan bagi penelitian selanjutnya.  
Karena dalam penelitian ini hanya menggunakan kriteria fisik/lingkungan, ekonomi, dan sosial serta fungsi wilayah, maka disarankan untuk dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan menggunakan kriteria lain untuk lebih melengkapi kajian sehingga diharapkan dapat lebih cermat dalam kajiannya serta bermanfaat dalam perencanaan pembangunan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman, B. (2005). *Regional Management dan Regional Marketing*. Semarang: Penerbit Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Bryant, C, White, L. G. (1987). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Budihardjo, E., dan Sujarto, J. (1999). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bratakusumah, S.D. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Djunaedi, A. (2002). *Metode dan Teknik Perencanaan*. Bahan materi kuliah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: MPKD-UGM.
- DPRD Lahat (2004). *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07 tahun 2004*.
- DPRD Lahat (2006). *Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat Nomor 20 tahun 2006*.
- Friedman, John dan William Alonso (ed) (1975). *Regional Policy: Reading in Theory and Application*, Cambridge: MIT Press.
- Hermanislamet, B. (2002). *Metode dan Tehnik Urban*. Bahan materi kuliah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: MPKD-UGM.
- Hermanisslamet, dkk. (2002). *Sistem Perpetaan dan Analisis Spasial Untuk Perencanaan*. Bahan materi kuliah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: MPKD-UGM.
- Ma'rif, Samsul (2000). *Pengertian Dasar dan Esensi Pengembangan Wilayah*. Semarang: PWK UNDIP.



- Muta'ali, Luthfi (2000). Teknik Analisis Regional. Yogyakarta: MPKD UGM.
- Nugroho, I., dan R.Dahuri (2004). Pembangunan Wilayah. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Parr, Hohn B. (1999). Growth Pole Strategies in Regional Economic Planning: A Retrospective View. Carfax Publishing.
- Pemda Kabupaten Lahat (1991). Keputusan Bupati Lahat Nomor 01 Tahun 1991.
- Pemda Kabupaten Lahat (2000). Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Tahun 2000.
- Pemda Kabupaten Lahat, Keputusan Bupati Lahat Nomor 26 tahun 2001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000.
- P4N UGM (1997). Pusat Penelitian Perencanaan Pembangunan, Yogyakarta: UGM.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah (2003). Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Sitohang, P. (1977). Pengantar Perencanaan Regional. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Sugiana, K. (2001). Metode dan Tehnik Perencanaan. Bahan materi kuliah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: MPKD-UGM.
- \_\_\_\_\_. 2005. Proses Perencanaan. Bahan materi kuliah tidak dipublikasikan. Yogyakarta: MPKD-UGM.
- Sujarto, D. (2001). Pilihan Strategis. Bandung: Penerbit ITB.
- Suryanto (1994). Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Strategis. Yogyakarta: Penerbit Forum Perencanaan Pembangunan.
- Tarigan, R. (2005). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.